Perspektif Arkeo-historis Migrasi Bugis dan Makassar: Kuasi Jaringan Nasionalitas Nusantara

M. IRFAN MAHMUD

Pendahuluan

Dalam beberapa naskah kuna non-Lontara' di nusantara dan laporan asing, orang Bugis dan Makassar digambarkan sebagai salah satu komunitas migran. Naskah *Tuhfah al-Nafis*, silsilah raja Melayu dan Bugis dan sekalian raja-rajanya [Melayu], naskah Hikayat Haji Sirat [Bali] adalah beberapa naskah kuna yang menggambarkan eksistensi para migran Bugis di tanah seberang. Sementara dalam beberapa laporan penulis Barat, misalnya Matthew Flinders [orang Inggris][1] mencatat bahwa, pada tanggal 17 Februari 1803, ia menjumpai 6 perahu Bugis di Tanjung Wilberforce. Pemimpin sekelompok perahu itu adalah Pobasso yang menyatakan bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah armada milik raja Bone, terdiri dari 60 kapal yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Sallo. Seorang putra Pobasso mengabadikan kehadiran orang Bugis itu dengan mencatat pelabuhan Jackson, tempat pangkalan Flinders dengan huruf Bugis "*pojesengngе*".

Kata "*pojesengngе*" mungkin dipakai untuk menyebut tempat aktifitas yang berhubungan dengan perahu dan laut. Menurut konteks tradisi pelayaran orang Bugis di Australia Utara --- meski masih perlu diuji---, kemungkinan "*pojesengngе*" dapat berarti pelabuhan transit [pemukiman sementara] tempat berkumpul menunggu musim Timur untuk berlayar pulang. Kata *poje* atau *makkapoje* berarti "tempat" (*noun*) yang menunjuk lokasi berlabuh dan berkumpulnya orang-orang (dalam jumlah yang tidak dapat dihitung) untuk aktifitas para pelaut, pedagang Bugis; sementara *séngêq* berarti ingatan atau monumen. Jadi kata *pojeséngêq* tersebut merupakan nomenklatur monumen eksistensi komunitas Bugis yang datang ke Australia Utara pada musim Barat dan pulang pada musim Timur[2]. Diantara mereka bahkan ada yang tinggal lebih lama di pantai utara Australia, mencari teripang dan hasil-hasil laut lainnya seperti penyu, mutiara, dan kayu cendana; yang terakhir ini banyak tumbuh di kepulauan Nusa Tenggara Timur (Kom. Pribadi, Mukhlis Hadrawi, 10 Mei 2000).

Jauh sebelum eksistensi migran Bugis dan Makassar direkam naskah non-Lontara', petualangan sudah sangat lazim. Naskah Lontara' melukiskan pelayaran yang mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan wilayah-wilayah tujuan pelayaran. Ada banyak kisah petualangan tokoh yang melegenda, seperti Sawerigading dan La Galigo. Tokoh Sawerigading, dikenal sebagai petualang dan pemberani yang melegenda di *tana* Bugis dan Makassar. Ia adalah anak dari *Pajung*[3] II Luwu, La Tiuleng, bergelar Batara Lattu. Naskah Lontara melukiskan perjalanan rombongan

Sawerigading mengarungi lautan, berperang, berjudi, memperebutkan gadis-gadis, dan menaklukkan negeri-negeri lain[4].

Kedatangan pedagang Melayu di jazirah selatan Sulawesi setelah Malaka direbut Protugis [1511] semakin mencerahkan wawasan tentang dunia luar dan mendorong perdagangan masyarakat di kawasan yang dikenal dengan sebutan *Ilhas dos Macaçar*. Tome Pires dalam *Summa Oriental*[5] melukiskan *mainstream* orang Bugis dan Makassar yang menjadi sumbu migrasi: gemar berkelana dan berdagang. Dalam prosesnya, tidak semua orang Bugis dan Makassar meninggalkan negerinya hanya sekedar bertualang atau berdagang. Tetapi sebagian diantara mereka ternyata hendak menetap di negeri lain. Dalam kebudayaan Bugis, meninggalkan negeri dengan maksud menetap di negeri lain disebut *mallekke' dapureng* yang secara harfiah berarti *memindahkan dapur*. Hal ini bermakna meninggalkan kampung dengan membawa seluruh keluarga dan barang-barang, dan berniat tidak akan kembali lagi (*to live permanently*). Khusus negeri Gowa, kontak-kontak intensif yang dirintis oleh pedagang Melayu berimplikasi kepada perubahan fundamental kebijakan pemerintahan Tumapa'risi Kallonna [1510-1546], yakni memajukan jaringan niaga maritim dengan tetap mempertahankan bidang pertanian sebagai dasar kekuatan ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan pemindahan pusat pemerintahan dari bukit Tamalate ke bandar Somba Opu. Pemindahan ibu kota ditandai dengan peletakan batu sedimen pada dinding benteng Somba Opu (Mukhlis, 1995: 3) dan Tamalate menjadi pusat religi dengan pusat ritus di *batu tomanurunga* (Lihat foto 1).

Pemindahan ibukota Gowa dari Bukit Tamalate ke muara sungai Jeneberang di Somba Opu menadai bangkitnya dunia maritim jazirah selatan Sulawesi. Sejak itu armada dagang Bugis yang sebagian diantara berpangkalan di Makassar menguasai jaringan perdagangan Nusantara. Hampir semua bandar penting di Nusantara disinggahi, dimana secara tidak langsung membuka komunikasi ekonomi serta sosial-budaya masyarakat Bugis dan Makassar dan bangsa lain di Nusantara. Hubungan intensif ekonomis secara berangsur-angsur menciptakan kantong pemukiman orang Bugis dan Makassar di sejumlah pulau nusantara[6].

Ada sejumlah fenomena sosial, budaya, ekonomi, sampai implikasi politis kehadiran kantong pemukiman Bugis dan Makassar di banyak titik strategis. Oposisi budaya dengan tetap mampu menjaga hubungan koeksistensi merupakan salah satu hal menarik dalam kerangka nasionalitas kita sekarang. Migran Bugis dan Makassar tidak jarang diberi konsesi atau bahkan dipercaya membina negara oleh bangsa lain, seperti terjadi di Bali, Matan, dan Samarinda. Fenomena kuasi jaringan nasionalitas Nusantara ini akan dipaparkan untuk memperlihatkan bahwa perbedaan-perbedaan lokal bukanlah masalah krusial bila diakomodasi secara memadai. Meskipun demikian, tulisan ini hanya berupa pemaparan dan bukan menganjurkan resep untuk menjembatani kegagalan kita dua tahun belakangan ini berbuat dalam perbedaan.

Latar Migrasi

Migrasi orang Bugis dan Makassar pada dasarnya didorong oleh *pangngadareng*. Ajaran *pangngadareng* menanamkan nilai-nilai *siri'*, bahwa manusia pada dasarnya

hidup bebas dan merdeka, tidak bisa diperbudak, baik oleh bangsa sendiri, apalagi oleh bangsa asing. Demi *siri'*, mereka berprinsip "lebih baik mati berdarah daripada hidup berkalang tanah". Jika lingkungan sudah tidak mendukung, baik karena alam maupun karena ulah manusia, tanah kelahiran yang telah memberi berkah dan membesarkan mereka pun tidak pantang ditinggalkan. Nilai ini kontradiktif dengan prinsip "makan tidak makan asal kumpul".

Berdasarkan catatan sejarah dan naskah, migrasi orang-orang Bugis dan Makassar didorong oleh empat hal. Pertama, *siri* (*weltanschauung* atau *lebensanschauung*). Siri adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian orang Bugis-Makassar yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat (Moein MG, 1994: 65). Menurut Andi Zainal Abidin (1983: 32-33), berdasarkan peristiwa atau dorongan jiwa untuk bermigrasi, *siri'* dapat dibedakan atas dua: *siri' masiri'* dan *siri' ripakasiri*.

Siri masiri', yakni dorongan *siri'* untuk bermigrasi yang dilandasi keinginan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan prestasi, martabat dan harga diri, baik untuk diri pribadi maupun untuk keluarga atau kelompok. Biasanya, dorongan untuk meninggalkan kampung halaman oleh karena dirinya atau kelompoknya merasa hina, hidup sengsara, miskin, bodoh, kurang berhasil dalam kehidupan, dan merasa tak mampu bersaing lagi, dan sebagainya. Jadi, dorongan migrasi oleh karena *siri' masiri'* timbul dari lubuk hatinya sendiri, bukan dari pihak lain.

Sementara *siri' ripakasiri'*, yakni dorongan *siri'* untuk bermigrasi yang disebabkan harkat dan martabat sebagai manusia dilanggar oleh orang lain. Seperti, ditampar, dimarahi di depan umum, istri atau anggota keluarga perempuannya di bawa lari atau diganggu. Pada umumnya, rakyat kecil yang dilanggar hak-hak kemanusiaannya dan tidak mampu melawan —karena pelakunya mempunyai kedudukan tinggi— akan memilih migrasi. Adat (*pa'batang*) Bugis dan Makassar memang membenarkan untuk membunuh yang menghina atau melakukan pembalasan yang setimpal. Masalahnya adalah apabila yang melakukan penghinaan tidak dapat dilawan oleh karena kedudukannya kuat, maka *ade'* memperbolehkan yang dihina tidak usah membalas, tetapi bermigrasi untuk mengembalikan *siri'*-nya dengan jalan berusaha menjadi orang terpandang di rantau. Justru itulah, bagi masyarakat Bugis dan Makassar, raja yang banyak ditinggalkan rakyatnya karena berbuat sewenang-wenang disebut *makurang siri* (tidak punya harkat dan martabat). Kalau jumlah yang meninggalkan negeri sangat banyak, raja dapat dikategorikan *mate siri'* (mati harkat dan martabatnya). Seorang raja yang kurang *siri*-nya diragukan asal-usulnya, karena seorang raja yang tinggi derajatnya sebagai turunan *Tomanurung* harus lebih banyak *siri*-nya daripada orang lain. Konsepsi ini merupakan refleksi dari ungkapan Bugis: *Siri'na wanuae kui riarungnge tatteppa, siasiri'i pabbanuana* (Adapun *siri* dari negeri, pada rajalah tersimpannya, karena satu *siri* dengan anak negerinya) (Mattulada, 1977: 48-50).

Kedua, *mitos sosial* bahwa nasib mereka akan menjadi baik bila bermigrasi (Abidin, 1983: 34). Orang Wajo misalnya, percaya bahwa mereka telah ditakdirkan oleh Dewata Sewwae (Tuhan) untuk menjadi hartawan, lewat migrasi. Hal ini

dilukiskan dengan nasehat : "*iapa muita décéng narékko musalaiwi tana Wajo*", artinya, "nanti baru dapat kebaikan kalau engkau tinggalkan negeri Wajo'". Mutiara nasehat ini bersumber dari makna kata-kata yang terpatri dalam lontara' *Sukku'na Wajo* karya Andi Makkaraka (Soehartoko, 1981: 204-205): "*Mappésona ri Déwata Séuaé, tasalaipi kampotta taita décéng*", yang artinya berserahlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggalkan kampungmu untuk menemukan kebaikan.

Implementasi mitos sosial bukan hanya pada tataran wacana publik, tetapi juga ditegaskan ke dalam bentuk perjanjian. Pemerintah Wajo mengeluarkan perjanjian di Lepa'deppa (± 1476) yang memberi jaminan warganya untuk melakukan emigrasi dan remigrasi. Hak-hak kebebasan seperti itu dinamakan *ade'ammara-dekangeng* (= adat kemerdekaan) (Abidin, 1983: 51). Dalam menggunakan haknya itu mereka tidak boleh dihalangi dan dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ada dasar hukum adatnya.

Ketiga, *perbudakan*. Orang-orang Bugis dan Makassar dahulu gemar memperbudak tawanannya. Budak-budak yang didapat dari tawanan umumnya dijual ke negeri lain. Pasca perang Makassar, jumlah budak semakin meningkat, terutama sebagai akibat krisis ekonomi[7]. Keadaan itu disebabkan tuan-tuan tanah di Gowa sebagai produsen beras[8] yang diekspor ke Maluku terpaksa menjual budak yang dipekerjakan di ladang-ladang pertanian. Menurut Edward Poelinggomang (1991: 46), akibat krisis ekonomi, sekitar 30 persen budak yang diperjualbelikan di bandar-bandar yang dikuasai oleh VOC merupakan budak Bugis dan Makassar. Gervaise (Pelras, 1973: 59-69) melukiskan bahwa pada tahun 1685 Duta Besar Perancis yang berada di Siam menerima kedatangan sebuah perahu Makassar yang membawa budak-budak dari Toraja. Seorang diantaranya dibeli oleh Duta Besar Perancis, dan dibawa ke negerinya. Ia menjadi orang Sulawesi pertama yang menginjakkan kaki di tanah Perancis.

Keempat, *karakter usahawan*. Crawfurd (1856) mengemukakan bahwa Bugis *trading emporia* berkembang di beberapa tempat di kepulauan nusantara, misalnya Bonerate (Selayar), dari mana orang-orang Bugis dan Makassar mengadakan pelayaran tahunan ke Bali, Batavia, Singapura, Irian, Maluku dan Manila (Abidin, 1983: 67-68). Karakter *entrepreneur* merupakan jembatan tumbuh-nya kantong pemukiman orang Bugis di beberapa tempat di nusantara.

Kontak dan Migrasi

Kontak antarkomunitas di dalam kawasan jazirah selatan Sulawesi dan sebagian besar daerah pulau Sulawesi, bahkan mungkin dengan dunia luar telah berlangsung sebelum periode *La Galigo*. Petunjuk arkeologis yang mengisyaratkan kontak terawal dengan dunia luar berupa penemuan manik-manik kornelian di Bantaeng dan manik-manik kaca di Ara yang diperkirakan sebagai barang impor yang lazim dari India sepanjang milenium pertama masehi [Kom. Pribadi dengan Ali Fadillah, Desember 1999]. Penemuan dari situs Pontanoabangka (Luwu Utara) berupa kornelian dan sisa katun kapas semakin memperkuat dugaan adanya kontak dengan dunia luar pra-La Galigo. Menurut hasil analisis C14 di *Australian National University* [ANU], kedua penemuan dari situs kubur di pesisir Danau Matano tersebut berada pada kisaran 1500

BP atau sekitar tahun 410-660 Masehi (Bulbeck, 1999).

Sementara dari sumber-sumber naskah tertua lukisan mobilitas gerakan penduduk di kawasan ini baru direkam dalam masa pemerintahan La Galigo. Kontak antar wilayah yang direkam naskah Lontara' menyebutkan sejumlah toponim, meliputi Luwu (Ware'), Cina (Pammana, Wajo), Wéwanriau' (Bone), Siang (Pangkep), Mangkasa (Makassar?), Balannipa dan Menre' (daerah Mandar). Selain itu, disebutkan pula daerah bagian Utara dan Timur, meliputi bagian pulau Sulawesi dan pulau-pulau bagian timur Nusantara, yaitu Wadeng (Gorontalo), Tompottikka' (Luwuk-Banggai), Sunrariaja (Kaili) dan kerajaan-kerjaan di Sulawesi Tengah; Wolio (Buton), Gima (Bima), Taranati (Ternate), Maluku (mungkin Maluku, Hitu?)[9]. Sayangnya kita masih belum dapat memastikan daerah sentrum yang paling berpengaruh di era tersebut. Hanya saja dalam penelitian di bekas kerajaan Siang di desa Sengkae, kabupaten Pangkep diperoleh informasi tentang bekas sumur simbolik yang menandai hubungan antara Luwu, Siang, dan Gowa sekitar pertengahan abad XVI.

Dalam periode abad XVII mobilitas keluar (emigrasi) meningkat tajam. Peningkatan mobilitas keluar berkaitan dengan terjadinya migrasi yang dilatarbelakangi *siri ripakasiri*, berupa kekecewaan dan kalah perang. Lineton mengatakan, bahwa sebagian besar orang Bugis dan Makassar meninggalkan daerah mereka karena *domestic conflicts* (Lineton, 1975: 177). Bahkan tidak sedikit bangsawan dan raja-raja melakukan migrasi karena kalah perang sebagai wujud sikap *siri ripakasiri*. Realitas sejarah menunjukkan bahwa sesungguhnya integrasi sosial dan politik di jazirah Selatan Sulawesi sampai akhir masa kolonial belum pernah tercapai. Perang atau pertempuran kecil tidak hanya terjadi antara pihak kolonial Belanda dengan para Arung atau Karaeng, tetapi juga antara Arung atau Karaeng sendiri. Kesaksian tentang situasi politik yang penuh konflik tampak dari tebaran benteng di banyak titik strategis di jazirah selatan Sulawesi. Di jalur sungai Cenrana sebagai jalur utama terdapat benteng Nagauleng dan benteng raja Paneki; di Luwu terdapat benteng Tompottikka, benteng Baebunta, dan Wotu; di Makassar terdapat benteng Tua, Panakukang, Somba Opu, Jumpandang, Tallo, Ana' Gowa; di Wajo benteng Tosora.

Ketika benteng Tosora dihancurkan oleh Arung Palakka misalnya, banyak orang melakukan migrasi. Di bawah hegemoni Arung Palakka 1670-1736, Wajo dilanda kelaparan hebat. Perdagangan orang-orang Wajo praktis terhenti. Perdagangan dengan dunia luar dilarang. Banyak sekali orang-orang yang menderita, merantau ke Makassar, Donggala, Bima, Kalimantan, Jawa, Sumatra, Singapura, Johor, Patani dan Kamboja (Abidin, 1985: 8). Sebagian dari orang Wajo migrasi di dalam pulau Sulawesi saja.

Daerah tujuan utama para migran Wajo pasca runtuhnya benteng Tosora adalah Makassar, terletak di kecamatan Wajo, Kota Makassar sekarang (Anonim, 1984: 94-96). Secara hipotetis kemungkinan orang Wajo bermigrasi ke Makassar karena dua hal. Pertama, Makassar secara politik berseberangan dengan Arung Palakka. Kedua, menaiknya peran Bandar Somba Opu yang sangat mendukung keberlangsungan bisnis orang Wajo setelah diberangus oleh Arung Palakka.

Sisa-sisa eksistensi orang Wajo berupa kuburan, rumah Bugis, dan komunitasnya masih dapat dijumpai sampai sekarang di sebelah Utara Kampung Melayu, di pinggir sungai Canira hingga ke Ujung Tanah. Di perkampungan inilah mereka membina masyarakat dalam pola tradisi Wajo. Pengangkatan pemimpin menurut tatanan Wajo yang disebut *matoa* [kepala adat][10] dan *limpo* [anggota majelis]. Ada duabelas pemimpin Wajo di Makassar yang bergelar *matoa*, yaitu [1] Te-Pabuki, [2] Te-Pakalo, [3] Amannagappa, [4] To-Tangga, [5] To-Dawe, [6] To-Patte, [7] La-Nongko, [8] La-Made, [9] Puana Esa, [10] Kennya, [11] La Kaseng, [12] La Koda. Matoa Wajo di Makassar yang terkenal adalah Amannagappa. Dibawah pimpinannya, perdagangan orang Wajo di Makassar maju pesat. Ia pula yang membuat undang-undang perniagaan dan pelayaran yang berisi dua puluh lima pasal.

Dalam masa kepemimpinan kaptain La Dolo, perdagangan di perkampungan Wajo mundur. Hal itu disebabkan datangnya kapal *Mattschapai Belanda*, seperti *KPM Nederlandsh Ind Stoomvaart Matschapai* dan musibah kebakaran yang beruntun di kampung Wajo. Akibatnya, terjadi remigrasi dan emigrasi keluarga Wajo ke bagian Barat Nusantara, seperti Singapura, Malaka.[11]

Kekalahan Sultan Hasanuddin yang berakibat ditandatanganinya perjanjian Bungaya [18 Nopember 1667] menimbulkan migrasi pertama secara besar-besaran. Motivasi adalah ingin bebas dan merdeka. Akibatnya, Kota Makassar lebih merupakan sebuah pemukiman dengan mayoritas golongan budak [*ata*]. Pada tahun 1676 jumlah penduduk *Vlaardingen*, yaitu bagian dari kota Makassar yang dikuasai Belanda, berjumlah 1500 orang, 55 persen diantaranya adalah budak. Golongan *to maradeka* [orang bebas] hanya 10 persen. Selain itu, terdapat 12 persen dari mereka adalah orang yang tidak memiliki kebebasan karena menjadi jaminan hutang-piutang (Sutherland, 1980).

Derasnya arus migrasi sejak abad XVII diindikasikan oleh luasnya cakupan sebaran nisan tipe Bugis-Makassar. Luasnya sebaran tipe makam Bugis-Makassar ini memperkuat catatan adanya kontak-kontak horisontal melalui perdagangan jarak jauh sekurang-kurangnya sejak abad XVI dan terus meningkat pada abad XVII dan XVIII, sehingga memungkinkan terbentuknya kantong-kantong pemukiman permanen di tanah perantauan dengan tetap menjalankan tradisi, bentuk seni daerah asalnya (Fadillah, 1999: 49). Beberapa tipe nisan Bugis-Makassar dijumpai di daerah Kalimantan, Sumatera, Melayu [Malaysia], dan Brunei, bahkan Patani (Fadillah, 1999: 48). Di Brunei makam migran Bugis ditemukan di kompleks makam Uduk-uduk (foto 2); dan di Bali di temukan di Pulau Serangan (foto 3).

Orang-orang Makassar diperkirakan bermigrasi ke daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Gowa pada permulaan abad XVI, yaitu Bima (1617), Sumbawa (1619), Banggai dan Sulu (1634), Timor (1640), Sumba, Dompu, Sanggar, Kutai, dan Berau (1618), Buton, Muna, Bungku, Solor, Tedak, Manggarai (1626), Limboto, Gorontalo, Tondano dan Sangir (1634); Buru, Tobea dan Bebe (1640) (Spillett, 1998: 64). Diperkirakan daerah yang terbanyak di tuju orang-orang Makassar ialah Bima dan Sumbawa. Karena sejak tahun 1618 terjadi kawin-mawin antara orang-orang Makassar dengan orang-orang Bima dan Sumbawa (Abidin, 1983: 57).

Indikasi kehadiran orang Makassar tampak dari bentuk nisan di Bima yang memperlihatkan adanya pengaruh bentuk nisan dan jirat seperti yang terdapat pada makam Tallo dan Tamalate di Makassar, bahkan di Seloparang terdapat nisan tipe Bugis-Makassar (Ambary, 1998: 60). Sementara daerah tujuan migrasi ke Barat mencakup: Batavia, Banten, Gresik, Mataram, Samarinda dan Malaka.

Arus migrasi dari jazirah selatan Sulawesi semakin kuat setelah perang Makassar berakhir tahun 1669, meskipun bentuk dan motifnya berbeda dengan masa sebelumnya. Migrasi besar-besaran terjadi karena kota Makassar tidak memberi jaminan keamanan bagi sebagian besar penduduknya, berhubung hampir semua benteng pertahanan Gowa sudah hancur. Karaeng Galesong, panglima perang Gowa yang perkasa, berlayar sampai di Jawa Timur. Karaeng Bontomarannu ke Banten, dan bahkan sebagian diantaranya berlayar sampai ke Thailand dan menetap di sana. Dalam satu bab buku De Graaf[12] menceriterakan pengembaraan Bontomarannu dari Gowa bersama 800 pengikutnya akhirnya sampai di Banten pada tanggal 19 Agustus 1671. Penemuan naskah lontara'[13] berbahasa Melayu dan Arab yang berisi tentang Agama Islam di Jawa Barat mungkin ada hubungannya dengan kehadiran migran Bugis dan Makassar pasca Perjanjian Bungaya (lihat lampiran 4).

Selain orang-orang Makassar, orang-orang Bugis Wajo terutama yang tinggal di pinggir sungai Canira terpaksa ikut bermigrasi juga makin ramai setelah benteng Ujung Pandang (*Fort Rotterdam*) direbut oleh Speelman-Arung Palakka. *Lontara' Sukku'na Wajo* [LSW] menyatakan bahwa dalam pertempuran di Somba Opu dan Ujungpandang kurang lebih 10.000 orang-orang Wajo mengambil bagian di bawah pimpinan Arung Matoa Wajo, La Tenrilai' To Sengngeng. Kemungkinan sebagian orang-orang Bugis-Wajo yang berdiam di kampung Wajo, dekat sungai Canira merantau ke Kalimantan Timur.

Perpindahan orang-orang Bugis dan Makassar disebabkan Somba Opu sebagai pelabuhan terbuka untuk segala bangsa sudah tidak dapat dipergunakan. Fasilitas dagang berupa loji, kantor pemerintah di dalam lingkungan benteng Somba Opu dibumihanguskan. Untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya, pedagang-pedagang Bugis terutama dari Wajo terpaksa mencari pangkalan strategis untuk pelayaran interinsuler, seperti beberapa tempat di pulau Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka.

Di Bali, diperkirakan pedagang Bugis telah mendarat di Loloan dan Badung (Fadillah, 1999: 18), kerajaan Jembrana pada paruh kedua abad XVII (Fadillah, 1999: 15-16). *Hikayat Haji Sirat* mengisahkan bahwa orang Bugis datang di Jembrana tahun 1660 dan 1669.[14] Pertanggalan itu diperkuat roman lokal *Jayaprana* dan *Layonsari* yang menyebut kedatangan orang Bajau dengan candrasangkala [*duk mangurit*] *sri puspa jihwa kawarna* [=1564 S atau 1642 M]. kemungkinan yang diisyaratkan oleh roman *Jayaprana* dan *Layonsari* adalah perahu Bugis yang mendarat di Buleleng tahun 1642. Eksistensi orang-orang Bugis [Wajo] di Bali, khususnya di pulau Serangan diperkuat oleh makam Puang Matoa. Makamnya berundak tiga, berhias, tidak berinskripsi dan bahannya dari batu dengan teknik susun yang menghasilkan bentuk makam sebagaimana lazimnya

makam pemimpin Bugis di Sulawesi. Kelompok yang dipimpin Puang Matoa di Bali digolongkan *wong Sunantara* atau *wong nusantara*.[15] Mereka mendirikan pemukiman di muara sungai Ijogading. Kampung ini berseberangan letaknya dengan sumur Wajo (Sodrie, 1986: 69). Bekas kantong-kantong pemukiman masih tampak dari rumah yang menyerupai bentuk tradisional Bugis di Sulawesi Selatan.

Migran Bugis di Bali pada dasarnya meninggalkan negeri mereka untuk mempertahankan kelangsungan bisnis yang terhambat ketika Makassar jatuh ke dalam kontrol Belanda, sehingga mereka harus mencari titik-titik strategis lain sebagai strategi untuk mempertahankan hidup, terutama kalangan bangsawan yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap subordinasi dan monopoli Belanda (Fadillah, 1999: 85).

Peta-peta tua beraksara Bugis dari masa kemudian juga menunjukkan bahwa rute pelayaran kapal-kapal Bugis menghubungkan tempat-tempat yang disebut dalam laporan Speelman[156]Penemuan peta Indonesia dalam huruf Bugis dari Pelras dan J. Noorduyn (Anwar, 1985: 2) dapat dihubungkan dengan capaian migrasi orang Bugis-Makassar. Peta kuno Bugis yang dipegang oleh Pelras berasal dari Museum Angkatan Laut Spanyol di Madrid. Peta itu direbut oleh tentara Spayol dari sebuah kapal perang Moro [Filipina Selatan pada abad XVIII]. Sementara peta yang didapat dari J. Noorduyn diberi keterangan "*De Bataviasche Kaart*" dalam *Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap* yang ditulis oleh C.C.F.M. Le Roux dengan judul "*Boeginesche Zeekaarten van den Indische Archipel*" [1935]. Peta ini berisi nama-nama pulau dan desa. Menurut Le Roux, peta tersebut di gambar di atas kulit sapi dalam warna hitam dan merah, berukuran 105 x 76 cm. Di belakang peta terdapat kata-kata yang ditulis dengan tinta: "*Boeginesche Zeekaart gavonden in de zeerover kampong Santel in de baai van Sekana, eiland Sinkep den 5 Juli 1859 door J.H.G. Jordans*" [peta laut Bugis ditemukan di kampung bajak laut Santhel di teluk Sekana, pulau Singkep, tanggal 5 Juli 1859 oleh J.H.G. Jordans[17]]. Dari penelitian A.A. Cense, peta Batavia diperkirakan dibuat antara tahun 1819 dan 1825. Sedangkan peta museum Madrid diyakini dibuat abad XVIII. Dan pada abad XVIII kegiatan orang Bugis di kawasan Selat Malaka sudah sangat meningkat. Mereka mampu mencapai karir politik tinggi, bahkan menduduki jabatan Raja Muda di Riau, dan di Selangor mendirikan kesultanan.

Peranan orang-orang Bugis dan Makassar di Riau, Lingga, Johor, Selangor, Aceh, Mempawa[18] dan Sukadana harus dicari pula pada sumber-sumber sejarah dan arkeologisnya. Di Kalimantan migran Bugis bermukim di wilayah sekitar Pontianak dan Mempawa, di pantai Barat dan di Pulau Laut, Pegatan, Bulungan, Gunung Tabur dan Kutai (Pelras, 1996: 321). Bahkan di Kalimantan Timur orang-orang Wajo sebagai mayoritas migran Bugis dengan izin Sultan Kutai membentuk 'republik demokratis' yang oleh mereka dinamakan Samarinda. Menurut Kertanegara (saudara sultan Kutai yang terakhir) perkataan Samarinda berasal dari kata 'sama rendah'. Kemungkinan dinamakan demikian karena kepala masyarakat Bugis tersebut bukanlah raja, tetapi hasil pilihan langsung orang-orang Bugis. Kepala masyarakat itu diberi gelar Pua' Adu'

(orang dituakan). Sejak itu Samarinda menjadi pusat perdagangan orang-orang Bugis.

Di Pasir, gelombang migran Makassar juga membangun perkampungan di sebelah kiri dan kanan sungai Pekan. Kampung itu disebut *Mengkasar* (=Makassar) sampai sekarang. Perkampungan ini didirikan oleh Karaeng Aji yang mundur dari jabatan sebagai raja Makasar karena dituduh sebagai anak haram, maka rakyat tidak menyetujui kebijaksanaan itu. Ia mula-mula pergi ke Kota Tinggi, Johor, lalu dengan para pengikutnya membuka perkampungan di sekitar sungai Pakan (Abidin, 1983: 66).

Kuasi Jaringan Nasionalitas

Wacana politik Patih Gajah Mada dipandang sebagai aset awal yang telah memberi kontribusi terbentuknya kerangka wawasan nasional (*national out-look*). Toponim yang disebutkan *Nagarakertagama* menunjukkan komitmen politik tersebut. Pada tempat-tempat yang dilansir *Nagarakertagama* ditemukan indikasi arkeologis berupa simbol 'matahari Majapahit' pada beberapa nisan-kubur di Kalimantan, prasasti di Sumatera. Justru itu, tidaklah berlebihan apabila 'Sumpah Palapa' Gajah Mada dijadikan pijakan diskursus akar nasionalitas kita.

Selain kerangka nasionalitas yang bersumber dari kebijakan politik tingkat tinggi, terdapat pula kuasi jaringan nasionalitas di luar kebijakan istana. *Mainstream* nasionalitas di luar kebijakan negara berlangsung secara horizontal, toleran, tidak bertendensi hegemoni, yang didorong oleh intensitas kontak-kontak individu atau kelompok masyarakat pada aras bawah [*grass-root*]. Kontak-kontak horizontal di masa lalu disponsori oleh para pedagang, kiai, ilmuan, petualang, migran dan pelarian. Kita bisa melihat misalnya, peran jaringan para kiai Sumatera [Minang]-Jawa, Sumatera-Sulawesi, Sulawesi-Kalimantan, yang secara tidak langsung membawa kesepahaman pandangan terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat yang berbeda secara kultur. Salah satu implikasi kontak akar rumput di jazirah selatan Sulawesi adalah proyek *musu asselengeng* yang merupakan momentum berubahnya jargon masyarakat Bugis-Makassar setelah kedatangan mubaligh Islam[19] dari usaha kolonisasi-militer ke usaha penyebaran paham keagamaan [Islam], baik di tingkat lokal maupun regional. Demikian pula peran jaringan pedagang Bugis dan Makassar memberi corak hubungan sosiologis-ekonomis[20] --yang menjadi ciri jaringan nasionalitas akar rumput-- menggantikan kepentingan ekspansi politik-militer yang dominan pada periode sebelumnya.

Kehadiran Orang Bugis di kantong-kantong strategis[21] merupakan fase kedua perkembangan wawasan nasional yang didorong oleh motivasi sosial, budaya dan ekonomi, ketimbang politik-militer. Di beberapa tempat terdapat pedagang Bugis yang dipimpin oleh Matoa Dagang, seperti Bali, Batavia, Banten, Samarinda, Pegatan, Bima, Sumbawa, Kalimantan Barat, Riau, Tumase (Singapura), Johor dan lain-lain.

Kuasi jaringan nasionalitas tampak dari adanya kesiapan orang Bugis atau Makassar dan juga kesediaan penduduk setempat untuk hidup dalam suasana pluralis. Lebih dari itu, konsesi dan pemberian *privilege* kepada orang Bugis untuk mendirikan pemukiman atau bahkan suatu manajemen masyarakat tersendiri dalam suatu negeri yang punya legitimasi

kuat merupakan aset awal tumbuhnya proses belajar bertoleransi. Wajah pluralistik yang toleran antara para migran, penduduk asli, dan istana merupakan fenomena menarik abad pertengahan.

Di pulau Bali misalnya, keturunan pedagang Bugis membentuk kantong-kantong pemukiman muslim yang populer dengan nama "kampung Bugis" dalam atmosfir Hindu/Budha di Kajanan, Singaraja, Serangan, Suwung, Tuban, dan Angan Tiga. Sampai sekarang jejak-jejak kehadiran mereka masih kelihatan di daerah-daerah tersebut. Bahkan, penduduk Bugis memperoleh kesempatan mengembangkan agama dan tradisinya sendiri. Akses agama dan kebudayaan yang baik tampak dari adanya mesjid, rumah Bugis, makam berinskripri Arab dan lontara, serta bertipe nisan makam Bugis-Makassar, yakni berbentuk gada (Fadillah, 1999: 30-36). Indikasi arkeologis itu menunjukkan bahwa migran Bugis yang dipimpin oleh *matoa* tetap memelihara otonominya dalam dimensi agama, politik, ekonomi, dan budaya, bebas dari sistem religi, tradisi politik-administrasi sosial Bali yang bercorak Hindu Budha (Fadillah, 1999: 81). Di sini terlihat adanya pemberian ruang dialog induktif bagi masyarakat yang berbeda secara sosial, politik dan budaya dalam konteks persaudaraan (*ukhuwwah basyariyyah*). Negeri yang didatangi migran Bugis tampaknya tidak menghegemoni seluruh makna kesosialan, keekonomian, kesukuan, dan keetnisan para migran. Sebaliknya, para migran juga berpartisipasi aktif dalam mempertahankan dan mengembangkan negeri baru mereka. Artinya dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan sikap ini, migran Bugis di Badung, kecuali sebagai juragan kapal dan pedagang, mereka juga dipercaya raja untuk menjadi pasukan kerajaan menghadapi ekspansi Mengwi dipimpin oleh '*puak matoa*'. Berkat partisipasinya mempertahankan eksistensi negeri Badung, mereka mendapat hak sebagaimana rakyat lainnya.

Peranan yang sama telah dimainkan oleh orang-orang Bugis ketika terjadi pertentangan di Aceh, dimana muncul seorang bangsawan Bugis yang berhasil menjadi Sultan Aceh tanpa melalui jabatan Raja Muda seperti di Johor yang bernama Sultan Alauddin Ahmad Syah (1727-1735). Orang Bugis ini biasa juga disebut Maharaja Lela Melayu dan Zainal Abidin. Ia adalah anak Abdul Rahim, yang menurut de Klerck berasal dari Bugis Malaka.

Keterlibatan orang Bugis dalam menghadapi ekspansi Mengwi di Bali dan peranannya di Aceh serta di Kalimantan didasari karena dorongan nilai *pecce*. Nilai *pecce* merupakan perasaan pedih dan perih yang dirasakan karena melihat penderitaan orang lain. Nilai ini berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan dan motivasi untuk berusaha, sekalipun dalam keadaan sulit dan berbahaya. Jadi *pecce* adalah turut merasakan penderitaan orang lain (Moein MG, 1994: 21). Dengan pegangan nilai *pecce* garis besar orientasi keagamaan dan kesukuan tidak berada pada bentuk ekstrim. Agama dan nilai-nilai primordial berfungsi sebagai sumber etika-moral (*religio-ethics*) dan suatu interaksi yang semakin intensif.

Kontak-intensif menimbulkan perasaan "senasib-sepenanggungan". Perbedaan yang ada tidak disembunyikan, tetapi tetap dalam kerangka memperkaya kehidupan bersama. Orang Bugis dan Makassar datang ke negeri-negeri seberang tampaknya bukan bertujuan merebut

kekuasaan, tetapi justru hanya mencapai prestasi tinggi demi *siri*. Pada umumnya mereka meninggalkan negerinya karena mempertahankan nilai-nilai *liberal spirit*. Ketika raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan melakukan kejahatan tanpa dipidana, maka banyak rakyat meninggalkan negeri (bermigrasi) sebagai satu bentuk protes keras kepada istana. Mereka datang bukan bertujuan untuk penghisapan dan membawa pulang kekayaan ke tanah asal. Tetapi mereka datang untuk membangun kehidupan yang lebih baik negeri baru secara bersama-sama. Naiknya migran Bugis jadi sultan agaknya berlebihan dipandang sebagai proyek hegemoni. Karena sesungguhnya mereka tampil didorong oleh keinginanan berprestasi (*siri*) belaka atau karena akibat hubungan kekerabatan dengan raja-raja setempat yang terjalin melalui perkawinan, seperti tergambar dalam buku *Silsilah Raja Melayu dan Bugis*:

> *"…. 'Saya memanggil ayah ini hendak mekhabarkan niat saya ini, hendak membalas jasa Opu-opu Raja Bugis itu kepada kita semua di sini, yaitu saya hendak lantik Opu Daeng Marewa itu menjadi Raja Muda memerintah Johor dan Riau dengan segala takluk daerahnya…. ' "* (Arena Wati, 1973: 82).

Melalui perkawinan dengan anak-anak Sultan, keturunan Opu Tenriborong, akhirnya menjadi Sultan di Johor, Selangor, Mempawa, dan Matan. Hal yang sama terjadi di Pasir di mana La Ma'dukelleng, Arung Singkang telah menjadi Sultan Pasir pada tahun 1726 dengan jalan mengawini putri Sultan Kutai (Abidin, 1983: 66). Khusus untuk kerajaan Johor, sebuah kitab kuna Melayu berjudul *Tuhfah al-Nafis* (hadiah yang mulia) karya Raja Haji Ahmad [1773] melukiskan tabir eksistensi migran Bugis (Noorduyn, 1987). Dikisahkan, pada awal abad XVIII dua orang migran Bugis bersaudara bernama Daeng Marewa dan Daeng Cellak yang memimpin beberapa kelompok pelaut yang besar jumlahnya datang di Johor. Kedua kakak-beradik inilah dianggap sebagai peletak dasar dari lembaga Raja Muda yang turun-temurun pada permulaan abad XVIII, sekaligus memapankan hubungan primordial Melayu-Bugis sampai sekarang. Dengan terbentuknya struktur raja muda —menurut Andaya (1970)— struktur kekuasaan Johor mengalami transformasi yang ditopang oleh kekuasaan Bugis. Hal ini menjelaskan wajah Bugis yang ikut aktif memberdayakan, karena kehadirannya banyak kemudian semakin memperkuat posisi negara Johor secara efektif dengan standar keterampilan militer, politik, dan ekonomi Bugis.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa kuasi jaringan nasionalitas pasca-Majapahit tumbuh melalui kontak-kontak dagang yang penuh toleransi (*tasamuh*). Para pedagang Bugis yang sudah muslim diterima dan mampu menunjukkan sikap toleransi inklusif. Sikap toleransi inklusif memuluskan jalan mencapai kedudukan tinggi, baik karena prestasi maupun perkawinan. Hubungan yang tercipta antara migran Bugis dengan penduduk setempat cenderung bersifat fungsional dan mampu menghadirkan aspek humanis atau sosial karitatif, sehingga dapat menjadi suatu *national out-look force*. Ada tiga faktor fundamental wawasan nasional (*national out-look*) yang ditampilkan jaringan sosial-ekonomi Bugis dan Makassar abad pertengahan, yaitu pluralisme (*ta'addudiyyah*); toleransi (*tasamuh*); dan

persaudaraan humanitis (*pecce* atau *ukhuwwah basyariyyah*).

Penutup

Ada empat kelompok daerah migrasi orang Bugis dan Makassar, yaitu: (1) negeri Melayu terutama di pantai Timur Pulau Sumatera seperti Riau dan Aceh. (2) kelompok kedua di "Pulau Tanjung Nagara", Kalimantan sekarang. Di antara nama-nama tempat yang jelas dikenal sekarang adalah Mempawa, Pasir, Kutai, dan Samarinda. (3) kelompok ketiga semuanya terdapat di Semenanjung Malaya, terdiri dari Tumasik (Singapura), Johor, Selangor. Di wilayah semenanjung ini banyak migran keturunan Bugis mengambil bagian dalam pemerintahan, bahkan sampai hari ini. (4) Dalam kelompok keempat meliputi tempat di bagian timur Nusantara, dari Bali sampai Nusatenggara.

Arus migrasi orang Bugis dan Makassar tampaknya lebih didorong oleh mentalitas budaya (*culture mentality*) dan konflik lokal (*domestic conflict*), bukan kebijakan politik tingkat tinggi bertendensi hegemoni. Kalaupun diantara mereka ada yang beruntung mencapai kedudukan terhormat [punggawa, raja muda] tampaknya lebih disebabkan prestasi yang berlatar *siri'*. Atau juga karena dukungan primordial yang diperoleh lewat perkawinan dengan keluarga istana, khususnya kasus di kerajaan Johor, Mempawa, Riau, Pasir, dan lain-lain.

Selain itu, mentalitas budaya *pecce* telah menarik mereka ke dalam konflik di tempat pemukiman baru mereka. Peran dan jasa menyebabkan beberapa diantara menjadi terpandang dan menjadi tokoh disegani. Bahkan ada sejumlah tokoh berhasil mendirikan negeri-negeri yang kelak menoreh sejarah.

Sejak abad XVII –XIX M. arus migrasi orang-orang Bugis dan Makassar secara tidak sadar menggantikan posisi Majapahit dalam proyek nasionalitas yang lebih permanen [secara sosial, ekonomi, politik, dan agama]. Pada umumnya tempat-tempat yang dicatat oleh Empu Prapanca dalam *Nagarakêrtagama* (1365 M) pada masa kemudian juga dicapai oleh orang-orang Bugis dan Makassar. Meskipun tampaknya gerakan nasionalitas orang-orang Bugis dan Makassar tidak didasarkan konsep politik tingkat tinggi, seperti Majapahit yang secara jelas melalui Patih Gajah Mada menegaskan "Sumpah Palapa". Ada indikasi arkeologis menunjukkan gerakan "nasionalitas" Orang Bugis dan Makassar secara sosial semakin memapankan nasionalitas, mungkin disebabkan tidak adanya tuntutan kepatuhan terhadap negeri-negeri asal atau pusat kekuasaan. Malahan justru kedatangan para migran Bugis dan Makassar memberi kekuatan kepercayaan diri yang berimplikasi terhadap independensi suatu masyarakat atau kerajaan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun militer. Hal ini secara samar-samar menyatakan jaringan keagamaan dan perdagangan ternyata lebih permanen menciptakan kantong-kantong kultural yang memberi kontribusi bagi pembauran dan interaksi sehat dibandingkan upaya politik sebagaimana yang dilakukan oleh Majapahit. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka berkoeksistensi dan membawa nilai-nilai reformis dan tidak bersifat inklusif. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa para migran Bugis dan Makassar berbekal referensi budaya. Di tempat baru mereka mendirikan

[20] Corak hubungan sosio-ekonomis sebelumnya diperankan secara oleh pedagang Melayu dan beberapa etnis lainnya.

[21] Lihat, Andi Zainal Abidin, 1985, *Op.cit.* hal. 9. Kehadiran mereka didukung oleh kebijakan pemerintah daerah asal mereka. Terutama Wajo, LSW 343 menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Arung Matoa Wajo La Salewangeng To Tenrirua (1713-1736) perdagangan Wajo berkembang pesat. Hal itu disebabkan La Tiringeng Daeng Mangapasa membentuk Bank Koperasi yang memberikan kredit kepada para pedagang yang hendak menjual barangnya ke luar Sulawesi.

Daftar Pustaka

Abdullah, Hamid. 1984. "Peranan Militer Bugis pada Abad XVIII di Semenanjung". *Analisis Kebudayaar* VI.2. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Abidin, Andi Zainal. 1983, *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni.

—— 1985. *Wajo Abad XV-XVI*. Bandung: Alumni.

Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1998, hal. 60

Andaya, Leonard Y. 1970. "Bugis Emigration in the Late Seventeenth Century". Unpublished 'd essay.

—— 1975. The Nature of Kingship in Bone. In *Precolonial State Systems in Southeast Asia. The Malay Peninsula, Sumatra, Bali-Lombok, South Celebes*, Edited by Anthony Reid and Lance Castle. Kuala Lumpur The Council of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.

Anonim. 1984. *Cerita Rakyat Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Anwar, H. Rosihan. 1985. "Kisah Dua Peta Indonesia Huruf Bugis". *Sinar Harapan*, tanggal 24 Agustus 1985, hal 2.

Batin, J. 1964. Problems of Personality in the Reinterpretation of Modern Malayan History. In *Malayan and Indonesian Studies, Essays Presented to Sir Richard Winstedt*, Edited by John Bastin and R. Roolvink. Oxford: Clarendom Press.

Bulbeck, David, dan Bagyo Prasetyo. 1999. "Tentative Final Report The Origins of Complex Society South Sulawesi". Report to Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Unpublished).

Cense, A.A., dan H.J. Heeren. 1972. *Pelajaran dan Pengaruh Kebudajaan Makassar-Bugis di Pantai Utara Australia*, Jakarta: Bhratara.

Cortesao, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. 1. Second Series. London: Hakluyt Society.

De Graaf. 1987. *Runtuhnya Istana Mataram*. Jakarta: Grafiti Pers.

Fadillah, Moh. Ali. 1990. "Sumbawa: Islamisasi, Makasarisasi, dan Subordinasi". *Berkala Arkeologi*, No. 1, tahun XI.

—— 1989. "Beberapa Catatan tentang Lontara". *Amerta* 11. Jakarta : Puslit Arkenas, hal. 41-53.

—— 1999. *Warisan Budaya Bugis di Pesisir Selatan Denpasar*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Haris, Tawaluddin. 1986. "Mesjid Luwu: Sebuah Tinjauan Arsitektur". *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, IV. Jakarta: Puslit Arkenas.

Johan Nyompa, M. 1983. "Sawerigading ke Cina". Ujungpandang: laporan penelitian lapangan Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujungpandang. [tidak terbit].

Lineton, Jacqueline. 1975. Pasompe' Ugi: Bugis Migrant and Wanderers. *Archipel* 10. Paris: du Centre National de la Recherche Scientifique.

Mattulada, "Beberapa Aspek Gotong Royong dalam Masyarakat Bugis-Makassar". *Berkala Berita Antropologi*, Th. IX, 30 Februari 1977.

Moen MG., A. 1994. *Siri Na Pacce.* Ujungpandang: Yayasan Makassar Press

Mukhlis. 1995. "Somba Opu Jantung Hati Makassar". Makalah Seminar *Penelusuran Hari Lahirnya Makassar*. Ujungpandang, [tidak terbit].

Musa, Rahman, dkk. 1983/4.*Sejarah dan Kebudayaan Islam.* Textbook III. Ujung Pandang: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, IAIN Alauddin.

Noorduyn, J. 1983. "De Handelsrelaties van het Makassaarse rijk volgens de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670," *Nederlandse Historische Bronnen uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap*, III. Amsterdam, Verloren, hal.97-123.

—— 1987. "Silsilah Bugis dari Keluarga Raja Muda di Kerajaan Johor". Makalah *Seminar Antarbangsa: Bahasa, Kesusastraan, dan Kebudayaan Melayu*, Bandar Seri Begawan, 3-8 Ogos 1987.

Pelras, Christian. 1973. *Sumber Kepustakaan Eropa Barat mengenai Sulawesi Selatan*. [West European Library Sources Concerning South Sulawesi]. Dies Natalis XXI Book of the Faculty of Law, Hasanuddin University. Ujungpandang (tidak terbit).

—— 1996. *The Bugis*. First Edition. Cambridge, Massachusettts: Blackwell.

Poelinggomang, Edward L. 1991. "Proteksi dan Perdagangan Bebas, Kajian tentang Perdagangan Makassar pada Abad ke-19". Amsterdam: Cenrale Muisdrukkerij VU [Disertasi, belum terbit].

Sodrie, Ahmad Cholid. 1985. "Prasasti Loloan Bali: sebuah Studi Pendahuluan". *PIA III*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

—— 1986. "Peninggalan Kepurbakalaan Islam di Pulau Serangan: Sumbangan Data bagi Arkeologi". *PIA IV*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Soehartoko. 1981. Merantau Bagi Orang Wajo. INTIM, No. 4 Tahun 1981.

Spillett, Peter. 1998. "The Search for Pre-Colonial History of Timor: Using Methods and Techniques of Oral Testimony, Interviewing and Recording". Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, *Walannae*, No. 1 – Juli 1998.

Sulistyo, Bambang. 1995. "Tinjauan Budaya Tradisi Perantauan Suku Bugis dan Makassar Abad XVIII-XIX". Seminar Memperingati Hari Purbakala ke 82. Ujungpandang, 25 Juli 1995 di Tamalanrea Unhas.

Sutherland, H. 1980. "Mestizos as Middlemen? Etnicity and Access in Colonial Makassar". Leage Vtturche: Paper Konfrensi Indonesia-Belanda, 3 Juni 1980.

Wati, Arena. 1973. *Silsilah Melayu dan Bugis*. Cet. 1. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

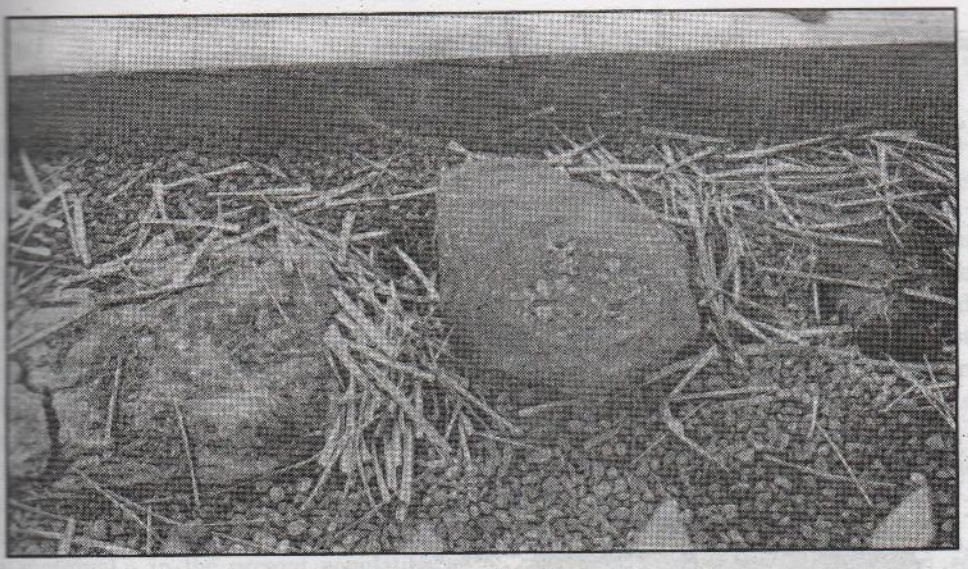


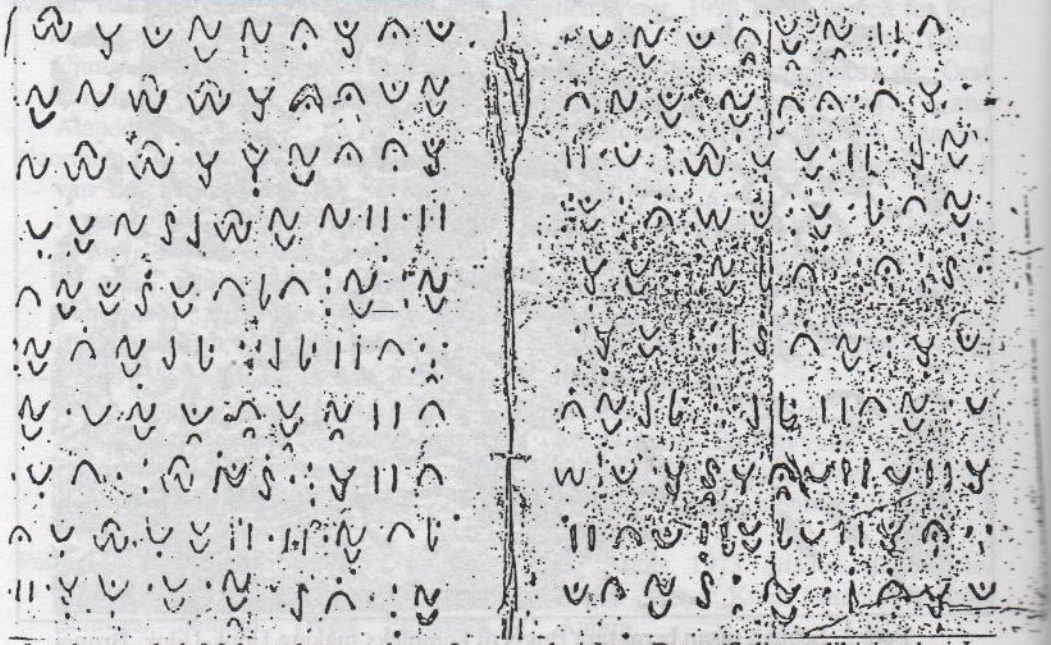
Foto 1. Batu Tomanurung di bukit Tamalate, Gowa.



Foto 2. Sebuah nisan beraksara Bugis di kompleks makam Uduk-Uduk, Brunei Darussalam (Sumber: Moh. Ali Fadillah, 1989).



Foto 3.
Nisan dengan aksara Lontara di Pulau Serangan, Denpasar Selatan (Sumber: Fadillah, 1989)



Lembar naskah Melayu dengan aksara Lontara dari Jawa Barat (Salinan dikirim dari J. Noorduyn kepada Hasan Djafar; penulis memperoleh salinan dari Suwedi Montana)